

# **BAB I**

## **GAMBARAN UMUM PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) REGIONAL 1 CABANG DUMAI**

### **1.1 Sejarah Singkat PT Pelabuhan Indonesia (Persero)**

Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai negara maritim. Di masa lalu, kerajaan-kerajaan maritim nusantara seperti Sriwijaya, Majapahit, kerajaan di Maluku pernah memegang kunci jalur perdagangan dunia lewat rempah-rempah. Pedagang-pedagang dari Gujarat dan China mengambil rempah-rempah dari Kepulauan Maluku lalu mengirimkannya melalui kapal-kapal dagang menuju Cina, Semenanjung Arab, Eropa, hingga ke Madagaskar.

Pelabuhan-pelabuhan kecil di Indonesia menjadi tempat persinggahan dan pusat perdagangan yang mempertemukan para pedagang dari berbagai bangsa, sehingga menjadi bandar niaga yang besar. Hal ini melatari lahirnya Pelabuhan Indonesia di era kemerdekaan.

Sebelumnya, untuk mengelola kepelabuhanan di Indonesia, dibentuk 4 pelindo yang terbagi berdasar wilayah yang berbeda. Pelindo I misalnya mengelola pelabuhan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau. Pelindo I dibentuk berdasar PP No.56 Tahun 1991, sedang nama Pelindo I ditetapkan berdasar Akta Notaris No.1 tanggal 1 Desember 1992.

Pelindo II mengelola pelabuhan di wilayah 10 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Pelindo II dibentuk berdasar PP No.57 Tahun 1991, Pelindo II Persero) didirikan berdasar Akta Notaris Imas Fatimah SH, No.3, tanggal 1 Desember 1992.

Pelindo III mengelola pelabuhan di wilayah 7 provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, NTB dan NTT. Pembentukan Pelindo III tertuang dalam Akta Notaris Imas

Fatimah, SH No.5 tanggal 1 Desember 1992, berdasar PP No.58 Tahun 1991.

Sedang Pelindo IV mengelola pelabuhan di wilayah 11 provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Pelindo IV dibentuk berdasar PP No.59 Tanggal 19 Oktober 1991. Sedang akta pembentukannya adalah Akta Notaris Imas Fatimah, SH no,7 tanggal 1 Desember 1992.

Masing-masing Pelindo memiliki cabang dan anak usaha untuk mengelola bisnisnya. Pelindo I, II, III, IV adalah Perusahaan BUMN *Non Listed* yang sahamnya 100% dimiliki oleh Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi Pemegang Saham Utama maupun Saham Pengendali Individu di Pelindo. Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia merupakan satu-satunya pemilik dan Pemegang saham tunggal.

*Merger* atau integrasi keempat Pelindo menjadi satu Pelindo yang kemudian diberi bernama PT Pelabuhan Indonesia ini berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Penggabungan PT Pelindo I, III, dan IV (Persero) ke Dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Pelindo II bertindak sebagai *holding* induk (perusahaan induk) dan ke-3 Pelindo (I,III, IV) bertindak sebagai *sub-holding*. Pembentukan *sub-holding* yang mengelola klaster-klaster usaha ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan Pelindo dan efisiensi usaha.

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor : S-756/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 perihal Persetujuan Perubahan nama, Perubahan Anggaran dasar dan Logo Perusahaan. Sehingga Pelindo II berganti nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.

## **1.2 Visi Dan Misi PT Pelabuhan Indonesia (Persero)**

### **1.2.1 Visi PT Pelabuhan Indonesia (Persero)**

“Menjadi pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia”.

Visi tersebut merupakan pernyataan cita-cita Perusahaan menjadi pintu gerbang utama jaringan logistik global di Indonesia. Cita-cita ini muncul dilandasi dengan potensi geografis, peluang bisnis serta kebijakan nasional yang membuka peluang bagi perusahaan untuk merealisasikan visi dimaksud.

### **1.2.2 Misi PT Pelabuhan Indonesia (Persero)**

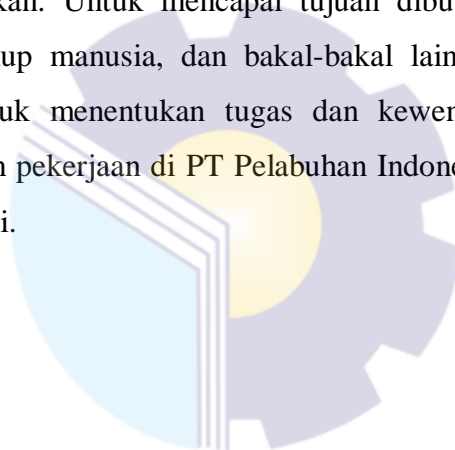
“Mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi negara”.

Menyediakan Jasa Kepelabuhanan & Maritim yang Handal & Terintegrasi dengan Kawasan Industri untuk Mendukung Jaringan Logistik Indonesia & Global dengan Memaksimalkan Manfaat Ekonomi Selat Malaka.

### **1.3 Struktur Organisasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Cabang Dumai**

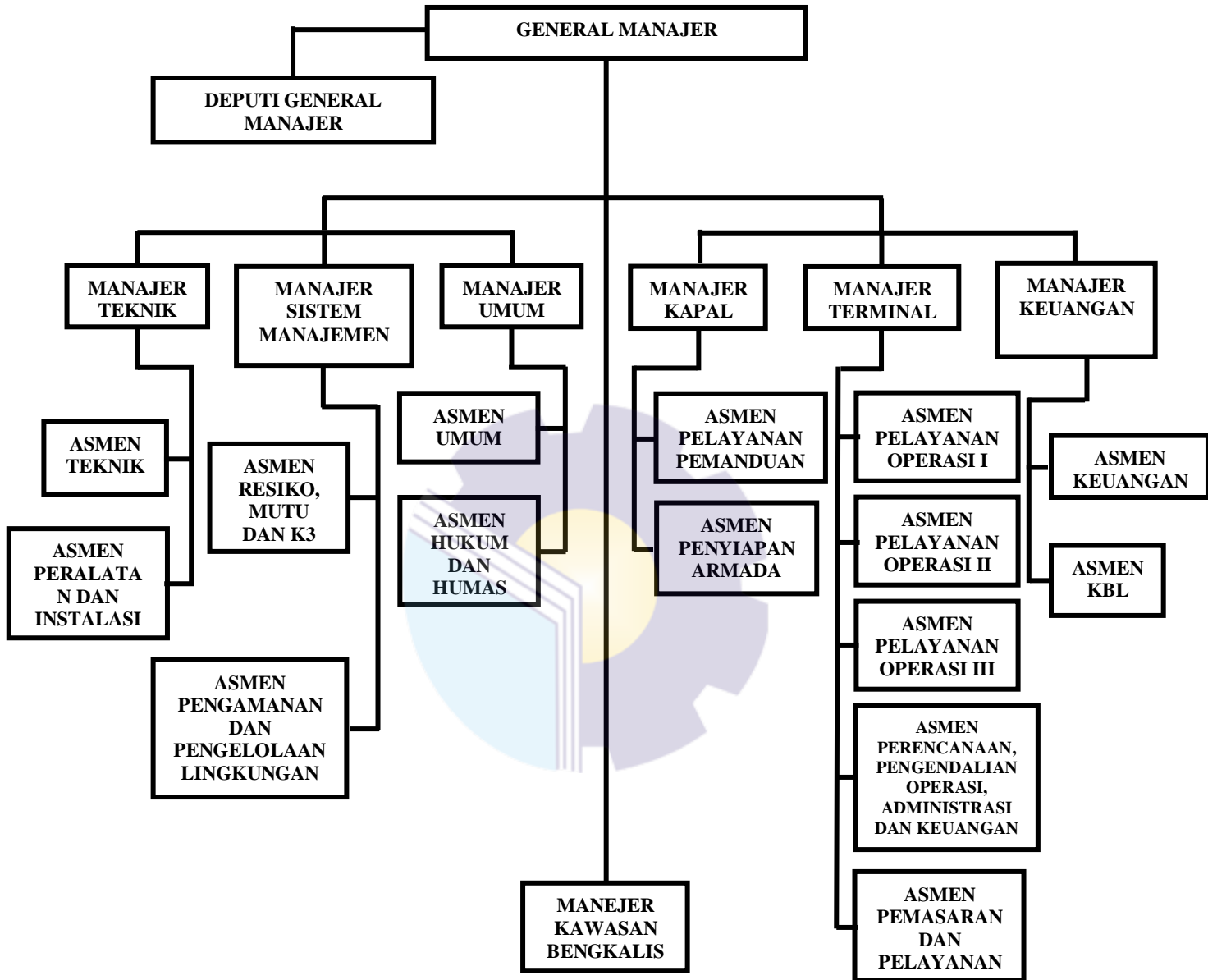
Menurut Hasibuan (2010: 128), Struktur Organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi penduduk dan jenis wewenang pejabat, bidang, dan hubungan perkerja, garis perintah dan tanggung jawab dan sitem pimpinan organisasi.

Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Cabang Dumai memiliki struktur organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan dibutuhkan berbagai sumber daya, mencakup manusia, dan bakal-bakal lainnya. Struktur organisasi bertujuan untuk menentukan tugas dan kewenangan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Cabang Dumai.



**STRUKTUR ORGANISASI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)**

**REGIONAL 1 CABANG DUMAI**



**Gambar 1.3 : Struktur Organisasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Cabang Dumai**

*Sumber : PT Pelabuhan Indonesia(Persero) Regional 1 Cabang Dumai*

## **1.4 Tugas dan Wewenang Masing-Masing Bagian PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Cabang Dumai**

Adapun tugas dan wewenang masing-masing bagian di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Cabang Dumai sebagai berikut:

### **1. General Manejer**

General Manager mempunyai tugas menjadi pemimpin tertinggi di perusahaan yang menetapkan langkah-langkah pokok dalam melaksanakan kebijakan dan sasaran-sasaran perusahaan, Menyetujui dan menandatangani surat-surat penting yang berkenaan dengan perusahaan, Bertanggung jawab atas semua kegiatan operasional perusahaan serta kontinuitas kegiatan perusahaan.

### **2. Deputi General Manajer**

Deputi General Manager mempunyai tugas pokok membantu General Manager dalam merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan kepelabuhanan pada Cabang Pelabuhan Dumai serta melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh General Manager.

### **3. Manejer Teknik**

Divisi Teknik mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, merekomendasikan serta melaporkan penyusunan program kerja kegiatan investasi dan pemeliharaan prasarana, sarana dan peralatan pelabuhan, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan bongkar muat, rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemantauan rencana induk pelabuhan dan lingkungan hidup, serta pelayanan air umum, air kapal dan pelayanan listrik.

Divisi Teknik terdiri dari :

- Dinas Fasilitas
- Dinas Peralatan dan Instalasi

#### **4. Maneger Sistem Manajemen**

Divisi Sistem Manajemen mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, merekomendasikan serta melaporkan penyusunan program kerja sistem manajemen mutu, manajemen resiko, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), sistem manajemen lingkungan (SML), *International Ship Port Security Code (ISPS Code)*, keamanan pelabuhan, *key performance indikator (KPI)* secara keseluruhan serta memastikan kesesuaian dan keefektifan dalam implementasinya.

Divisi Sistem Manajemen terdiri dari :

- Dinas Risiko, Mutu dan K3.
- Dinas Pengamanan dan Pengelolaan Lingkungan.

#### **5. Maneger Umum**

Divisi Umum mempunyai tugas melaksanakan proses administrasi SDM, hubungan ketenagakerjaan, tata usaha dan rumah tangga, serta hukum dan hubungan masyarakat (Humas).

Divisi Umum terdiri dari :

- Dinas Umum
- Dinas Hukum dan Humas

#### **6. Maneger Bisnis Kapal**

Divisi Bisnis Kapal mempunyai tugas pokok merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, merekomendasikan serta melaporkan penyusunan program kerja pelayanan labuh, pemanduan, penundaan, tambat dan penyiapan armada.

Divisi Bisnis Kapal terdiri dari :

- Dinas Pelayanan Pemanduan.
- Dinas Penyiapan Armada.

## 7. Manajer Bisnis Terminal

Divisi Bisnis Terminal mempunyai tugas pokok merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, merekomendasikan serta melaporkan penyusunan program kerja perencanaan dan pengendalian operasi, bongkar muat dan pemupukan, administrasi keuangan dan kinerja bongkar muat, pelayanan operasi dermaga lainnya, pelayanan pemadam kebakaran dan rupa-rupa pemasaran, penanganan keluhan pelanggan, penerapan *Service Level Agreement (SLA) / Service Level Guarantee (SLG)*, serta penanganan *Customer Relationship Management (CRM)* pada kegiatan pelayanan terminal dan/atau bongkar muat.

Divisi Bisnis Terminal terdiri dari :

- Dinas Pelayanan Operasi I.
- Dinas Pelayanan Operasi II.
- Dinas Pelayanan Operasi III.
- Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasi, Administrasi dan Keuangan.
- Dinas Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan.

## 8. Maneger Keuangan

Divisi Keuangan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, merekomendasikan serta melaporkan penyusunan program kerja kegiatan pengendalian anggaran, akuntansi, perbendaharaan, kemitraan dan bina lingkungan (KBL), penyusunan laporan keuangan dan verifikasi pranota dan penotaan.

Divisi Keuangan terdiri dari:

- Dinas Keuangan
- Dinas Kemitraan dan Bina Lingkungan.